



## BAB VII

### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar ***Pembangunan Wilayah Sulawesi adalah:***

1. Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
2. Pengembangan industri berbasis logistik;
3. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Adapun tujuan pengembangan Wilayah Sulawesi tahun 2015-2019 dalam RPJMN tersebut adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sulawesi dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan industri berbasis logistik, jagung, perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM, ilmu dan teknologi secara terus menerus. Sasaran pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya .
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 14 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di



daerah tertinggal sebesar 8,65 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,81 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,69.

3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi serta 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya pengangguran dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 48 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (5)



Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (6) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (9) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (10) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Sulawesi.

8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 24 kabupaten/kota sasaran (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makassar, Kota Palu, Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sulawesi semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sulawesi terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 4,8 persen (2013) menjadi 5,2 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Sulawesi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.4. sebagai berikut.

**TABEL 7.1.**  
**SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI PER PROVINSI**  
**TAHUN 2015-2019**

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.1	7.2	7.8	7.8	8.3
Gorontalo	6.7	7.2	8.4	8.6	8.9
Sulawesi Tengah	7.6	7.7	8.1	8.3	8.9
Sulawesi Selatan	7.4	7.4	8.3	9.1	9.1
Sulawesi Barat	8.1	9.8	10.1	10.2	10.4
Sulawesi	7.8	8.0	8.2	10.1	10.3

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

**TABEL 7.2.**  
**SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI PER PROVINSI**  
**TAHUN 2015-2019**

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara					
Gorontalo					
Sulawesi					
Sulawesi	9.1	8.0	7.9	7.2	6.6
Sulawesi Barat	10.2	9.4	8.7	7.9	7.1
Sulawesi	13.5	12.4	11.4	10.4	9.3

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014



**TABEL 7.3.**  
**SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI PER PROVINSI**  
**TAHUN 2015-2019**

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	201	2018	2019
Sulawesi Utara	7.2	7.0	6	6.5	6.3
Gorontalo	4.0	3.8	3	3.5	3.4
Sulawesi	3.6	3.5	3	3.2	3.1
Sulawesi	5.6	5.4	5	5.0	4.4
Sulawesi Barat	2.0	1.9	1	1.9	1.8
Sulawesi	3.7	3.5	3	3.2	3.0

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

**TABEL 7.4.**  
**KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI**  
**SULAWESI UTARA DALAM PERPRES 2/2015 TENTANG RPJMN 2015-2019**

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara

<b>Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional</b>	
<b>PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG</b>	
1.	Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung *
<b>PERHUBUNGAN DARAT</b>	
1.	Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Manado
<b>PERHUBUNGAN UDARA</b>	
1.	Pengembangan Bandara Samratulangi
2.	Pembangunan Bandara Sitaro
3.	Pembangunan Bandara Miangas*
4.	Pengembangan Bandar Udara Melonguane
5.	Pengembangan Bandar Udara Naha Tahuna
<b>PERHUBUNGAN LAUT</b>	
1.	Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna
2.	Pengembangan Pelabuhan Lirung
3.	Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Internasional Bitung)*



4.	Pembangunan infrastruktur penunjang ekspor hasil perikanan Bitung
5.	Pengembangan Pelabuhan Manado
6.	Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Tahuna
7.	Pengembangan Pelabuhan Petta
8.	Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Melangoane
9.	Pengembangan Pelabuhan Miangas
10.	Pengembangan Pelabuhan Buhias
11.	Pengembangan Pelabuhan Pehe
12.	Pengembangan Pelabuhan Ruang
13.	Pengembangan Pelabuhan Amurang
14.	Pengembangan Pelabuhan Bangka
15.	Pengembangan Pelabuhan Montehage
16.	Pengembangan Pelabuhan Gangga
17.	Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Labuan Uki
18.	Pengembangan Pelabuhan Kawio
19.	Pengembangan Pelabuhan Marore
20.	Pengembangan Pelabuhan Matutuang
21.	Pengembangan Pelabuhan Kawaluso
22.	Pengembangan Pelabuhan Tamako
23.	Pengembangan Pelabuhan Lipang
24.	Pengembangan Pelabuhan Bukide
25.	Pengembangan Pelabuhan Kahakitang
26.	Pengembangan Pelabuhan Kalama
27.	Pengembangan Pelabuhan Ngalipaeng
28.	Pengembangan Pelabuhan Mangarang
29.	Pengembangan Pelabuhan Karatung
<b>JALAN</b>	
1.	Pembangunan Jalan Bypass Manado II (Maumbi-Kairagi)
2.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Karakelong (Esang-Rainis)
3.	Pembangunan Jalan Lintas Penghubung (Pinogaluman-Duloduo-Molibagu)
4.	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Sangihe (Enemawira-Tomako)
5.	Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung



6. Pembangunan Jalan Tomohon - Manado
<b>ASDP</b>
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Melonguane
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marampit
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas*
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Likupang*
5. Kapal Penyeberangan Danau Tondano
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawakuso
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Talise
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Manado Tua*
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Siladen
10. Pemb. Terminal/Shelter Bis Air Pesisir Pantai Manado dan Sungai Tondano
11. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas
12. Penyeberangan RoRo ASEAN Bitung-General Santos
13. Pembangunan kapal penyeberangan 1000GT
14. Pembangunan kapal penyeberangan 750GT
15. Pembangunan kapal penyeberangan 200GT
16. Pembangunan Kapal Pembersih Alur Pelayaran
<b>KETENAGALISTRIKAN</b>
1. PLTG/MG Minahasa Peaker 150 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Sulbagut (Amurang) 100 MW
3. PLTU Sulut 1 50 MW
4. PLTU Sulut 3 50 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
<b>TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA</b>
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
<b>SUMBER DAYA AIR</b>
1. Perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 1) Manado
2. Perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 2) Manado
3. Pembangunan Sabo Dam Sungai Milangodaa Kab. Bolsel
4. Pengamanan Pantai Amurang (Lanjutan) Kab. Minahasa Selatan





5. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas (Lanjutan) Kab. Kepulauan Talaud
6. Pembangunan Bendungan Lolak Kab. Bolaang Mongondow
7. Pembangunan Bendungan Kuwil Kab. Minahasa Utara
8. Revitalisasi Danau Tondano Kab. Minahasa Utara
<b>PENDIDIKAN</b>
1. Pengembangan STAKN Manado, STAIN Manado
2. Fasilitasi pembangunan rumah ibadah semua agama
3. Fasilitasi Sekber dan Operasional FKUB di provinsi dan kab/kota
4. Fasilitasi Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG)
5. Fasilitasi sarana keagamaan
6. Pengembangan Pusat Pembinaan Agama (Bukit Doa)
7. Pengembangan wisata religi Bukit Kasih di Kab. Minahasa
<b>KESEHATAN</b>
1. Pengembangan RS Rujukan Regional (RS Noongan di Minahasa, RS Popundayan Bolaang Mongondow, RS Liung Kendage Sangihe, RS Walanda Maramis di Minahasa Utara)

## 7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan, maka kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan nasional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan sumberdaya lainnya.

Khusus untuk 12 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) **PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH – OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN (SPKD-ODSK)**

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan





berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat miskin. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya ini telah menetapkan berbagai kebijakan yang merupakan inovasi daerah adalah :

- a. Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- b. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin (KIS)
- c. Pemberian Bea Siswa Miskin SD/MI, SLTP/MT, dan SMU/SMK
- d. Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA)
- e. Peningkatan Infrastruktur Dasar
- f. Penguatan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumberdaya lokal dan Industri Kreatif
- g. Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Keahlian Khusus
- h. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)
- i. Pemberian *Transfer of Asset* pada Rumah Tangga Miskin

Berbagai target dan prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan RPJMD 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
2. Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah, serta pengembangan teknologi informasi pendidikan.
3. Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi terutama anak dari keluarga miskin sesuai data BDT 2015.
4. Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan nonformal, juga perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kejuruan dan politeknik.
5. Penerapan pendidikan budi pekerti sejak dini juga peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
6. Pengembangan teknologi informasi, juga perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan dan politeknik.
7. Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Berupa Operasi Katarak Gratis untuk penduduk miskin, operasi sumbing,



- pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pemberian makanan tambahan anak sekolah untuk siswa miskin, dan sebagainya.
8. Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin.
  9. Pembangunan rumah layak huni dan rusunawa bagi penduduk miskin serta perbaikan kawasan perumahan/pemukiman di wilayah sangat miskin.
  10. Peningkatan promosi produk UMKM, pengembangan ekonomi kreatif lokal, dan pemantapan serta optimalisasi fungsi kelembagaan Koperasi.
  11. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan.
  12. Pembangunan dan peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  13. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk menentukan daerah/wilayah target dan program prioritas. Berbagai target dan prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan RPJMD 2016 -2021 yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin sebesar 40 % sampai pada tahun 2021. Program Prioritas sesuai dengan target dan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan 1 : Berdasarkan jumlah penduduk miskin**

Sesuai dengan hasil kesepakatan kebijakan pemerintah provinsi dalam program ODSK yang ditandatangani di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, Minahasa Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas.

### **2. Pendekatan 2 : Berdasarkan indikator sosial ekonomi**

#### **• Kepala rumahtangga miskin perempuan**

Untuk menjaga kinerja perempuan sebagai sumber pendapatan keluarga, perlu adanya perhatian pemerintah khususnya BP3A . Beberapa program prioritas :



- a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- b. Program perlindungan hak perempuan
- c. Program pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan.
- Penduduk miskin usia di atas 60 tahun

Usia lansia dalam rumahtangga yang umumnya sudah tidak produktif tentunya menjadi tanggungan keluarga. Untuk itu agar tidak lebih membebani rumah tangga miskin perlu adanya penanganan khusus dari dinas sosial. Beberapa program prioritas yang dapat menopang para lansia :

  - a. Program jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi lansia
  - b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lansia.
- Jumlah anak dari keluarga miskin yang tidak bersekolah

Pentingnya pendidikan dalam mengangkat rumahtangga miskin keluar dari masalah kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi untuk bisa menjadi tenaga kerja terampil atau ahli. Kualitas dan kinerja tenaga kerja berbanding lurus dengan pendapatan/ gaji/ upah yang akan diterima.

Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan bidang pendidikan lewat program-program prioritas seperti :

  - a. Program wajib belajar dua belas tahun.
  - b. Program manajemen pelayanan pendidikan
  - c. Program pendidikan non formal.
- Jumlah anak dari keluarga miskin yang bersekolah.

Jaminan pendidikan untuk siswa miskin akan memberi peluang bagi mereka untuk giat belajar dan menunjukkan prestasi akademik di sekolah. Bahkan pemerintah harus mampu menstimulus mereka untuk terus sekolah bahkan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan bidang pendidikan lewat program-program prioritas seperti :

  - a. Program wajib belajar dua belas tahun.
  - b. Program manajemen pelayanan pendidikan
  - c. Program pendidikan non formal.



- Jumlah orang cacat dari keluarga miskin

Ketidakterdayaan seseorang tentunya menjadi beban keluarga, apalagi pada rumahtangga yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Peran pemerintah lewat dinas sosial diharapkan mampu memberikan solusi bagi rumahtangga miskin agar tidak semakin terpuruk di bawah garis kemiskinan karena ketidakterdayaan anggota rumahtangga yang ada. Program prioritas di dinas sosial untuk mengatasi masalah ini adalah :

- a. Program jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- b. Program pemberdayaan keluarga miskin dan KAT.
- c. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- d. Program pembinaan penyandang cacat.

- Jumlah orang yang sakit kronis dari keluarga miskin

Bidang kesehatan sebagai salah satu bagian penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan membuat eksistensi Dinas Kesehatan menjadi salah satu SKPD target. Walaupun dampak kesehatan umumnya tidak langsung dan membutuhkan proses yang tidak cepat, masalah kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang akan mampu teratasi. Untuk dapat bekerja dan beraktivitas dalam meningkatkan pendapatan keluarga perlu kondisi kesehatan yang menopang kinerja usaha. Program prioritas untuk mengatasi masalah ini terdapat di Dinas Kesehatan, diantaranya :

- a. Program Pencegahan penyakit menular
- b. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin
- c. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- d. Program standarisasi pelayanan kesehatan

- Jumlah individu usia 15 sampai > 60 tahun dari keluarga miskin yang tidak bekerja.

Usia kerja dan tidak bekerja atau disebut juga pengangguran merupakan masalah penting dalam suatu perekonomian. Jika kondisi ini dialami oleh rumahtangga yang hidup di bawah garis kemiskinan akan memberi dampak pada kejahatan sosial di masyarakat. Untuk mengatasi ini menjadi tanggungjawab beberapa SKPD terkait seperti



Dinas pendidikan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas koperasi dan UMKM dan dinas sosial. Perlu ada identifikasi pasar kerja sehingga angkatan kerja yang sedang mencari kerja dapat terserap. Beberapa program prioritas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

- a. Program peningkatan kesempatan kerja
- b. Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM.
- c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- d. Program pendidikan non formal.
- Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan papan atau perumahan yang layak. Khusus pembangunan perumahan di perkotaan adalah dengan membangun rumah susun sedangkan pembangunan RTLH hanya untuk di perdesaan. Saat ini program prioritas yang ditetapkan :

- a. Program Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
- b. Program Pengembangan perumahan
- Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki akses air bersih/air dari sumber yang terlindungi

Bagian infrastruktur pelayanan dasar salah satunya adalah tersedianya air bersih yang bisa di akses oleh masyarakat untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Kabupaten kota yang terbanyak belum memiliki akses air bersih bagi rumahtangga miskin, harus memprioritaskan programnya pada :

- a. Program pembangunan rumah tinggal layak buni
- b. Program pengembangan lingkungan sehat
- c. Program pengembangan perumahan.
- d. Program lingkungan sehat perumahan.
- Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki akses listrik dari PLN

Pemenuhan akses listrik dari PLN juga merupakan bagian pelayanan infrastruktur dasar, karena berbagai aktivitas ekonomi keluarga sehari-



hari sangat membutuhkan listrik. Berbagai program prioritas terkait masalah ini adalah :

- a. Program pembangunan rumah tinggal layak huni.
- b. Program pengembangan ketenagalistrikan.
- c. Program pengembangan perumahan.
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana perumahan.
- Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki akses bahan bakar memasak.

Saat ini gas/LPG/listrik merupakan pilihan bahan bakar memasak bagi keluarga sehari-harinya. Dan ini menunjang aktivitas-aktivitas lainnya dalam pemenuhan peningkatan pendapatan keluarga keluar dari garis kemiskinan. Berbagai program prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah berhubungan dengan indikator ini adalah :

- a. Program pembangunan rumah tinggal layak huni.
- b. Program pengembangan perumahan.
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana perumahan.

Ketimpangan pembangunan sebagai salahsatu pemicu kemiskinan sesungguhnya sudah ada sejak awal kehidupan. Adapun pendorong utama ketimpangan antara lain: Ketimpangan dalam hal peluang dan akses pelayanan dasar (Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur Dasar seperti Air Bersih, Sanitasi, dan Listrik). Ketimpangan kualitas pekerjaan, bagi mereka yang terampil memperoleh penghasilan yang tinggi, sementara bagi yang kurang terampil akan terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Ketimpangan perlindungan guncangan (ekonomi, kesehatan dan bencana alam) karena tidak semua memiliki perlindungan dan jaminan sosial. Untuk mengatasinya diperlukan strategi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan cara meningkatkan pendapatan kelompok kurang mampu, mengurangi biaya hidup melalui upaya perlindungan sosial yang tepat sasaran dan tepat mekanisme penyaluran (Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan).



Hal penting lainnya untuk mengurai ketimpangan dan kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas (*Inclusive Growth*), melalui sistem perpajakan yang adil dan efektif, mendorong produktivitas UMKM melalui peningkatan akses pada KUR dan bantuan usaha lain, mendorong iklim usaha yang kondusif, mendorong industri manufaktur padat perkerja dan meningkatkan konektivitas ekonomi (infrastruktur) serta mendorong pembangunan perdesaan juga sektor pertanian. Selain itu perlu komitmen yang kuat dan langkah kongret dari Pemerintah untuk mengurai ketimpangan dan kemiskinan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur. Untuk itu ada 4 area utama yang penting bagi pemerintah dalam menangani ketimpangan saat ini dan dimasa depan, yaitu: memperbaiki pelayanan (*local service delivery*), pekerjaan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan, perlindungan terhadap guncangan, serta kebijakan fiskal yang tepat.

Selain itu upaya yang dilakukan dalam bidang ini juga mencakup kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan berbasis karakteristik desa; Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal melalui fasilitasi, pelatihan, pendampingan serta memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa.

## 2) PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

Melalui sinergitas pusat dan daerah akan dibangun dan dikembangkan pembangunan boulevard Amurang Tumpaan, pembangunan jalan Amurang *by Pass*, pembangunan Monumen Patung Tuhan Yesus, Monumen Putri Duyung, Gerbang Sasayaban dalam rangka pengembangan pariwisata, Pelebaran jalan trans Sulawesi, Pembangunan infrastruktur penunjang ekspor hasil perkebunan dan perikanan; Pembangunan dan





pengembangan Pelabuhan Amurang, Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi antar moda mengembangkan transportasi terintegrasi dengan mendukung pembangunan jalur Kereta Api Manado-Makasar.

Selain itu akan dibangun juga infrastruktur pemukiman seperti penanganan air bersih, sanitasi, air minum dan pengembangan pengelolaan air limbah. Untuk mencegah bencana yang terkait dengan abrasi pantai juga akan dibangun tanggul pemecah ombak di sepanjang pesisir pantai sesuai dengan kemampuan kerangka pendanaan dan kapasitas riil keuangan daerah.

### 3) PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, yaitu:

**Tabel 7.5**  
**Angka Partisipasi Pendidikan Dasar**

<b>Pendidikan Dasar</b>	satuan	Target awal	Target Akhir RPJMD
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
<b>III. Pendidikan Anak Usia Dini</b>			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2

Disamping itu, sasaran lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki



dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah, meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

#### 4) PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penanganan prioritas dibawah ini:

a) **Upaya Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak.** Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target SDGs tahun 2030, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya.

Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Peserta KB cukup banyak merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi potensi untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

b) **Kematian Bayi dan Balita.** Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

c) **Usia Sekolah dan Remaja.** Penyebab kematian terbesar pada usia ini adalah kecelakaan transportasi, disamping penyakit demam berdarah dan tuberkulosis. Masalah kesehatan lain adalah penggunaan tembakau dan pernikahan pada usia dini (10-15 tahun). Hasil Riskesdas 2010, secara nasional prevalensi remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek



adalah 35,2% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 31,2%. Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien. Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak menular.

**d) Usia Kerja dan Usia Lanjut.** Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.

**e) Gizi Masyarakat.** Persoalan gizi yang dihadapi kabupaten Minahasa Selatan adalah *Stunting*. *Stunting* terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi *stunting*, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-*Scaling Up Nutrition*) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor



kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

- f) Penyakit Menular.** Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat menurun. Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15-49 meningkat.

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah dilakukan pengembangan *Early Warning and Respon System* (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan *trend* kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB.

- g) Penyakit Tidak Menular.** Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami *double burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).

Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat selain itu dalam survey ekonomi nasional 2006 disebutkan penduduk miskin menghabiskan 12,6% penghasilannya untuk konsumsi rokok. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian



Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat.

- h) Penyehatan Lingkungan.** Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang cukup bermakna. Upaya pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya terus mengalami peningkatan. Dalam hal penyehatan lingkungan manajemen air limbah rumahtangga masih menjadi persoalan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kerja keras.
- i) Sarana Kesehatan.** Badan kesehatan dunia (WHO) menargetkan agar minimal terdapat empat Puskesmas PONED di tiap kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2015 prosentase Puskesmas PONED sebagaimana target WHO di Sulawesi Utara adalah sebanyak 86,67%. Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED berbeda dengan konsep yang digunakan puskesmas rawat inap. Konsep rawat inap pada Puskesmas PONED adalah perawatan inap kepada pasien pasca tindakan emergensi (*one day care*). Dengan demikian, puskesmas non rawat inap yang memiliki tempat tidur dan mampu melakukan tindakan emergensi obstetri dan neonatal dasar, dapat menyelenggarakan PONED. Di Minahasa Selatan, harus diakui bahwa masih ditemukan kekurangsiapan sarana kesehatan masyarakat seperti kurang lengkapnya obat, sarana, dan alat kesehatan; kurangnya tenaga kesehatan; dan belum memadainya kualitas pelayanan.
- j) Kesetaraan Gender.** Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia telah meningkat dimana peningkatan IPG tersebut pada hakikatnya disebabkan oleh peningkatan dari beberapa indikator komponen IPG, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup.
- k) Sistem Informasi Kesehatan.** Pada tahun 2014 diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK). PP ini



mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini menuntut komitmen dari setiap stakeholder pembangunan kesehatan untuk memastikan data dan informasi kesehatan yang dipublikasikan harus akurat, update dan akuntabel.

**l) Masyarakat ekonomi ASEAN.** Pada tahun 2016 sudah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakuan ASEAN *Community* yang mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi ASEAN *Economic Community*, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius, terencana, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (*Mutual Recognition Agreement - MRA*) tentang jenis-jenis profesi yang menjadi cakupan dari mobilitas. Dalam MRA tersebut, selain insinyur, akuntan, dan lain-lain, juga tercakup tenaga medis/dokter, dokter gigi, dan perawat. Tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang, akan dicakupi pula jenis-jenis tenaga kesehatan lain.

**m) Sustainable Development Goals.** Dengan berakhirnya agenda *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang meliputi 17 *goals*. Dalam bidang kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat





berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya. Selain SDGs, terkait dengan pembangunan kesehatan yang menjadi komitmen internasional adalah *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) merupakan respon global yang paling kuat terhadap tembakau dan produk tembakau (rokok), yang merupakan penyebab berbagai penyakit fatal. Sampai saat ini telah ada sebanyak 179 negara di dunia yang meratifikasi FCTC tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penggagas dan bahkan turut merumuskan FCTC. Akan tetapi sampai kini justru Indonesia belum mengaksesinya. Sudah banyak desakan dari berbagai pihak kepada Pemerintah untuk segera mengaksesi FCTC. Selain alasan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat, juga demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam konteks WTO - Khususnya *General Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* serta *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklores* (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk komitmen global yang juga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian.

Berdasarkan uraian focus penanganan pembangunan kesehatan maka sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan pada RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2016-2021 adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan *universal* melalui sinergitas pengelolaan Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

## 5) PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan





kesejahteraan dan aktifitas ekonomi masyarakat sekitar area atau destinasi pariwisata. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (a) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; (b) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; (c) pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta (d) pengembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata. Dalam rangka pembangunan pariwisata juga akan dilakukan festival Pembangunan Kelembagaan Pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan dengan strategi fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata serta peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

## **6) KEDAULATAN PANGAN**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kedaulatan pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi daerah. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein. Sasaran lainnya adalah terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memantapkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) serta penerapan sistem rantai dingin di sentra perikanan serta terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan. Kelimpahan sumberdaya ikan ini dipertahankan dengan mewujudkan manajemen



sumberdaya dan kawasan perikanan berkelanjutan. Sasaran lainnya adalah tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5.

#### **7) REVITALISASI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

Melalui sinergitas pusat dan daerah juga akan dilaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan seperti penyediaan tenaga pendamping khususnya sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, bantuan benih dan bibit, pencetakan sawah baru, ekstensifikasi pertanian dan perkebunan, serta upaya memperkuat pengembangan agroindustri berbasis kelapa sehingga terjadi peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun kelapa, selain itu diupayakan juga pemberian bantuan bibit pertanian, perikanan dan perkebunan bagi 200 kelompok tani di Minahasa Selatan.

#### **8) PERIKANAN DAN KEMARITIMAN**

Kebijakan dan prioritas pembangunan perikanan dan kemaritiman adalah terbangunnya jaringan sarana dan prasarana kelautan dan kemaritiman terutama yang menyentuk aktifitas kelompok nelayan miskin di Minahasa Selatan. Sasaran lainnya adalah upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; serta mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. Sasaran yang hendak dicapai adalah termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

#### **9) PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI**

Investasi, sebagai komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih berkesinambungan, sangat dipengaruhi oleh terciptanya iklim usaha yang kondusif. Kegiatan investasi pada gilirannya



akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, antara lain penciptaan lapangan kerja baru dan ekspor. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberian pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya iklim investasi sehingga lebih banyak investor yang menanamkan modalnya di Minahasa Selatan. Oleh karenanya pelayanan terpadu 1 pintu akan diarahkan agar dapat menurunkan waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 4 hari dan 3 prosedur, meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN hingga tahun 2021, serta meningkatnya peranan PMDN dan menurunnya peranan PMA dalam realisasi investasi agar memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian domestik.

#### **10) REFORMASI BIROKRASI**

Melalui sinergitas pusat dan daerah reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Peningkatan kinerja dan disiplin ASN Peningkatan inovasi dan kreatifitas ASN di Minahasa Selatan.
2. Penempatan pejabat ASN dengan prinsip *right man on the right place* atau penempatan ASN sesuai kompetensi dan profesionalitas.
3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja.
4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
5. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
6. Peningkatan proporsi belanja modal.
7. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah menuju pencapaian Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Taat Administrasi dengan target Wajar Tanpa Pengecualian.
8. Penataan Perangkat Daerah sesuai kewenangan UU 23 tahun 2014.
9. Pelaksanaan pembangunan sesuai asas good governance (Clean and Clear Government).



10. Pemberian insentif, penghargaan dan sanksi (*rewards and punishment*) bagi ASN atas pelaksanaan pekerjaan/kinerja.

## 11) REVOLUSI MENTAL

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, pemupukan jiwa revolusi mental pada anak-anak di usia dini, remaja dan pemuda, melalui pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan kewargaan yang memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didikan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru menjadi suri tauladan bagi murid. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bilamana diajarkan hanya melalui *instructional learning approach* semata. Sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian anak bangsa di Minahasa Selatan adalah :

- Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah bahkan di tingkat PAUD;
- Meningkatnya pemahaman atas karakter dan jati diri dalam pengenalan budaya mapalus, serta konsep Sitou Timou Tumou Tou.

Sasaran pembangunan revolusi mental lainnya adalah :

- Pembentukan watak dan karakter masyarakat Minahasa Selatan yang memiliki mental pejuang, tangguh, berdisiplin, bersemangat, memiliki toleransi, kreatif dan inovatif serta memiliki mental sportif pergaulan



bermasyarakat dan bernegara, dengan target utama pada pendidikan anak usia dini, remaja dan pemuda Kabupaten Minahasa Selatan

- Mental melayani (*service oriented character*) dan mental *marketer* diperlukan untuk menjadi warga yang memiliki daya saing.
- Pengembangan perilaku saling menolong dalam konteks budaya *Torang Samua Ciptaan Tuhan, torang samua basudara*”, yang saling memperhatikan, *baku-baku sayang, dan baku-baku bae*.
- *Pemantapan budaya menabung dan perilaku hidup bersih dan sehat* dimana didalamnya termasuk budaya olahraga, budaya konsumsi makanan sehat, budaya tidak merokok, serta budaya hidup rukun dan damai.

Sasaran pembangunan revolusi mental ini hanya dapat dicapai jika ada Pelibatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter.

## 12) PENGELOLAAN BENCANA DAN MITIGASI IKLIM

Sasaran Penanggulangan Bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*) khususnya bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung berapi, membangun infrastruktur kota terkait dengan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana, selain itu akan dilakukan juga pembangunan tanggul pemecah ombak, normalisasi daerah aliran sungai serta penanaman pohon dikawasan lahan kritis dan disekitar mata air sebagai upaya pemulihan keadaan lingkungan akibat kemarau panjang tahun 2015.

**Strategi dan arah kebijakan serta Program Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan disajikan pada Tabel 7.6**